

PEMROV NTT BARU SELESAIKAN KERUGIAN NEGARA RP 10 MILIAR



www.nttprov.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi NTT semester II tahun anggaran (TA) 2015, diketahui total kerugian negara/daerah bagi 22 kabupaten/kota se-Provinsi NTT sebesar Rp 20 miliar lebih. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur NTT, Drs. Benny A Litelnoni, S.H, M.Si, ketika ditemui Pos Kupang setelah membuka rapat pematkhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi NTT semester II tahun anggaran (TA) 2015 di kabupaten/kota se-NTT, di Aula Gedung Kevikepan, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Selasa (6/10/2015).

Litelnoni mengatakan, data perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada SKPD lingkup pemerintah kabupaten/kota di NTT sampai dengan Agustus 2014 saat pematkhiran data semester I di Kabupaten Ende menunjukkan, dari total kerugian negara/daerah senilai Rp 20 miliar lebih, yang telah ditindaklanjuti penyelesaiannya ke kas negara/daerah sebesar Rp 10 miliar lebih (50 persen) dan masih tersisa Rp 10 miliar lebih. Dikatakannya, data tersebut memberikan gambaran bahwa upaya tindak lanjut yang dilakukan di kabupaten/kota belum optimal. Litelnoni mengajak para wakil bupati, wakil walikota dan para sekretaris daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya agar lebih aktif memberikan perhatian dan pembinaan kepada pimpinan SKPD dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut. Litelnoni juga berharap agar forum ini dijadikan ajang evaluasi sejauh mana *responsibility auditor* dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

Menurut data tahun 2014 menunjukkan pertumbuhan ekonomi NTT sebesar 5,04 persen, pendapatan perkapita mencapai Rp 13,62 juta, tingkat inflasi 7,76 persen, pengangguran terbuka

2,89 persen dan kemiskinan sebesar 19,60 persen. Kabar mengembirakan adalah tingkat inflasi lebih rendah dari nasional dan pertumbuhan ekonomi NTT melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Realita capaian pertumbuhan ekonomi NTT di atas nasional untuk pertama kalinya sepanjang sejarah berdirinya NTT. Ini menunjukkan hasil kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas semua komponen masyarakat di NTT menurut Litelnoni. Hadir dalam rapat itu, para wakil bupati/ walikota dari 22 kabupaten/kota di seluruh NTT, para sekretaris daerah, para kepala Inspektorat se-NTT, dan para pimpinan SKPD se-Kabupaten Matim dan undangan lainnya.

Sumber:

<http://kupang.tribunnews.com/2015/10/07/pemprov-ntt-selesaikan-kerugian-negara-rp-10-miliar>
Surat Kabar Harian Pos Kupang, 7 Oktober 2015.

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara yang dimaksud dengan Kerugian Negara/daerah adalah kekuarangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (biasa disingkat SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ke dalam SKPD termasuk Sekretariat Daerah, Staf-staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, Inspektorat Daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, Kecamatan-kecamatan (atau satuan lainnya yang setingkat), dan Kelurahan/Desa (atau satuan lainnya yang setingkat).
3. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok

ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut. PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun).

4. Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu.